

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Indonesia sebagai negara yang sedang giat membangun, peran pemerintah sangat dibutuhkan untuk memberikan dorongan yang lebih kuat dan cepat bagi pergerakan roda perekonomian. Untuk itu, pemerintah melakukan berbagai upaya dan tindakan strategis melalui berbagai bentuk kebijakan. Salah satunya melalui kebijakan belanja yang dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam struktur APBN, belanja pemerintah pusat memainkan peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan nasional, terutama dalam meningkatkan dan memelihara kesejahteraan rakyat. Hal ini terutama karena besaran dan komposisi anggaran belanja pemerintah pusat dalam operasi fiskal pemerintah mempunyai dampak yang signifikan pada permintaan agregat dan output nasional, serta mempengaruhi alokasi sumber daya dalam perekonomian. Selain itu, peranan penting anggaran belanja pemerintah pusat dalam perekonomian, sebagai salah satu perangkat kebijakan fiskal, juga berkaitan dengan ketiga fungsi utama anggaran belanja pemerintah, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi. (Sukarningsih, 2021).

Penganggaran merupakan suatu unsur atau bagian penting dalam sebuah perencanaan yang dibuat suatu entitas melalui tahap formulasi strategis terhadap alokasi sumber daya sebagai upaya pencapaian tujuan yang tergambar dalam visi dan misi suatu organisasi atau perusahaan. Anggaran dapat digunakan sebagai alat perencanaan biaya dan pendapatan, komunikasi, motivasi, serta sebagai alat pengendali bagi atasan kepada bawahannya. Pada sisi lain penganggaran berbasis kinerja berorientasi pada sistem penganggaran yang menekankan pada pencapaian hasil dan keluaran (*output based*) dari program dan kegiatan dengan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya yang terbatas dan efektif dalam pencapaian *output* dan *outcome*-nya. Kinerja hasil dan keluaran tersebut merupakan kinerja yang melekat pada Kementerian Lembaga terkait. Dengan kata lain perlu upaya untuk terus melakukan koordinasi yang lebih intensif guna mensinergikan kinerja

yang hendak dicapai oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Lembaga terkait. (Sukarningsih, 2021)

Suardana, (2019) Anggaran memiliki fungsi sebagai alat perencanaan dan sebagai alat pengendalian. Anggaran sebagai alat perencanaan mengindikasikan target yang harus dicapai oleh pemerintah, sedangkan anggaran sebagai alat pengendalian mengindikasikan alokasi sumber dana publik yang disetujui legislatif untuk dibelanjakan, hal ini penting karena belanja pemerintah merupakan salah satu kontributor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu kepala negara sangat menekankan pentingnya penyerapan anggaran yang optimal yang sesuai dengan perencanaan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga tidak terjadi keterlambatan. Adapun penelitian Manurung & Mauliddina, (2021) mengatakan anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang ingin di capai selama periode tertentu yang di nyatakan dalam ukuran finansial.

Penyerapan anggaran merupakan sesuatu yang mengacu pada sejauh mana dana yang di alokasikan dalam anggaran pemerintah yang di berikan kepada setiap organisasi akan terserap dalam program-program, atau kegiatan yang direncanakan secara efektif dan efisien untuk kepentingan publik. Agar penyerapan anggaran bisa berjalan secara efektif dan efisien ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor yang mampu mempengaruhi penyerapan anggaran adalah kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi. Di dalam organisasi sumber daya manusia merupakan kunci utama bagi pencapaian tujuan organisasi. Oleh karena itu pengelolaan sumber daya manusia harus dilakukan sebaik mungkin agar dapat memberikan kontribusi yang maksimal pada organisasi. Pernyataan diatas sejalan dengan hasil penelitian Iqbal, (2022) Hasil pengujian menunjukkan bahwa semakin kuat kompetensi SDM maka derajat penyerapan anggaran akan semakin meningkat

Menurut Patiran & Bonsapia, (2018) Komitmen organisasi merupakan dimensi perilaku penting yang dapat digunakan untuk menilai kecenderungan seseorang untuk bertahan sebagai anggota organisasi. Komitmen organisasi merupakan identifikasi dan keterlibatan seseorang yang relatif kuat terhadap organisasi dan bersedia serta berusaha keras bagi pencapaian tujuan organisasi.

komitmen organisasi juga dinilai turut merupakan hal yang mempengaruhi penyerapan anggaran (Fitriasuri & Yuliani, 2022). Adapun penelitian yang dilakukan Rahmiati dkk, (2023) Berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap penyerapan anggaran di Universitas Muhammadiyah Riau.

Rendahnya penyerapan anggaran di Indonesia di berbagai lembaga instansi pemerintah daerah merupakan suatu peristiwa yang sering terjadi. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan 3 (tiga) undang undang yaitu UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, UU No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan tanggung jawab dan pengelolaan keuangan Negara serta UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara. Permasalahan mengenai rendahnya penyerapan anggaran tersebut menjadi permasalahan dalam pengelolaan keuangan pemerintah. Penyerapan anggaran yang tidak maksimal mengindikasikan beberapa program kerja tidak terlaksana yang berarti tidak semua tujuan yang ingin dicapai telah terlaksana. Penyerapan anggaran merupakan suatu hal yang penting untuk menciptakan efek pengganda (*multiplier effect*) dalam perekonomian negara. Realisasi belanja instansi pemerintah merupakan faktor penting dalam meningkatkan perkembangan ekonomi di suatu negara karena penyerapan anggaran yang lambat dapat berakibat pada terlambatnya perkembangan ekonomi (Widianingrum, 2017). (Fitriasuri, 2022)

Menurut Iqbal, (2022) dalam penelitiannya penyerapan anggaran yang lebih rendah menjadikan dana yang ada tidak tersalurkan kepada masyarakat dan ke sistem perekonomian, sehingga penerima manfaat tidak sepenuhnya bisa menikmati pelayanan dan pembangunan yang bersumber dari anggaran yang telah di sediakan oleh pemerintah daerah. Salah satu permasalahan dalam anggaran organisasi publik adalah penyerapan anggaran yang cenderung rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun menyebabkan ketidakmerataan penyerapan anggaran (Suwarni dan Maruf, 2018). Masalah rendahnya penyerapan anggaran di semester pertama dan membengkak di akhir tahun masih terjadi sampai saat ini (Suheri, 2019). Apabila dilihat lebih jauh, belanja pemerintah mengindikasikan lonjakan drastis pada pertengahan sampai akhir triwulan ketiga. Sehingga tren yang muncul

bahwa empat bulan terakhir tahun anggaran selalu mengalami peningkatan secara tajam. World Bank menyebutkan bahwa negara berkembang seperti Indonesia mempunyai permasalahan penyerapan anggaran dengan istilah “*slow back-loaded*” yaitu penyerapan yang rendah di awal sampai pertengahan tahun, dan akan mengalami lonjakan pada akhir tahun anggaran. Penumpukan pencairan dana ditriwulan IV merupakan indikasi bahwa penyerapan anggaran tidak sejalan dengan rencana program yang telah ditetapkan di awal (Anfujatin, 2016)

Penelitian yang sudah dilakukan oleh Lestari dan Yuliani, (2022) tentang Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengadaan Barang/Jasa Dan Komitmen Organisasi terhadap Penyerapan Anggaran Belanja. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kualitas sumber daya manusia dan pengadaan barang/jasa berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran belanja. Adapun penelitian yang dilakukan Irianto (2022) tentang Pengaruh Perencanaan Anggaran, Pencatatan Administratif, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Lingkungan Birokrasi Terhadap Tingkat Penyerapan Anggaran Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Siak. Dari hasil penelitian tersebut menyimpulkan perencanaan anggaran, pencatatan administratif, kompetensi sumber daya manusia dan lingkungan birokrasi terhadap tingkat penyerapan anggaran berpengaruh positif terhadap penyerapan anggaran.

Fenomena terjadi pada tahun 2020 menyampaikan harapan agar OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak segera mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sehingga penyerapan anggaran bisa di tingkatkan sekaligus ikut mensosialisasikan Gebrak Masker kepada Masyarakat. Ditahun 2021 Kepala Kejari Siak, Dharmabella Tymbaz mengatakan pemanggilan sejumlah kepala dinas ini merupakan program pendampingan dan pengawasan hukum kepada beberapa Dinas yang berada di dalam wilayah hukum Kejari Siak. Di mana khusus di Kabupaten Siak penyerapan anggarannya masih di bawah 50%, sehingga sesuai dengan Instruksi Bapak Jamintel agar jajaran kejaksaan di daerah-daerah ditugaskan untuk mendorong dan mengoptimalkan penyerapan anggaran dimaksud," terang Dharmabella.

Tahun 2022 Bupati menyampaikan rapat evaluasi kegiatan pembangunan yang dilaporkan masing-masing pengguna anggaran dinas sampai Juli 2022, realisasi fisik baru mencapai 47,63 persen dan keuangan sebesar 38,37 persen dari Rp2,031 triliun APBD 2022. Artinya sampai Juli realisasi fisik belum sampai 50 persen. Padahal Bupati berharap sampai Juli minimal realisasi anggaran mencapai 55 sampai 60 persen. Pada tahun 2023 ini tingkat serapan anggaran di kabupaten Siak Sri Indrapura masih di angka 41 persen pada triwulan III ini, realisasinya cukup signifikan karena ini masih dalam tahun berjalan. seperti yang dijelaskan oleh kepala badan keuangan dan aset daerah (BKAD). Dan ditahun 2024 pemerintah daerah siak menindaklanjuti terkait temuan bpk terkait laporan anggaran tahun 2023. Adapun hasil pemeriksaan BPK tahun 2023 menunjukkan beberapa permasalahan dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan belanja modal di beberapa perangkat daerah. Beberapa temuan penting diantaranya adalah ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kontrak dan pengelolaan aset yang belum optimal. BPK memberikan rekomendasi agar Pemkab Siak segera memperbaiki sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan fenomena yang timbul dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang belum optimal dalam penyerapan anggaran pada SKPD Kab. Siak Sri Indrapura dan didukung dengan penelitian terdahulu, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana cara sumber daya manusia, gaya kepemimpinan transformasional dan komitmen organisasi dalam SKPD. Dengan demikian penelitian ini mengambil judul **“Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap tingkat penyerapan anggaran SKPD (Studi kasus di Kabupaten Siak Sri Indrapura)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dibuat suatu rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap tingkat penyerapan anggaran pada SKPD Kab Siak Sri Indrapura ?

2. Bagaimana pengaruh komitmen organisasi terhadap tingkat penyerapan anggaran pada SKPD Kab Siak Sri Indrapura ?

1.3 Batasan Masalah

Pembahasan pada penelitian ini lebih memfokuskan mengenai kompetensi sumber daya manusia dan komitmen organisasi terhadap tingkat penyerapan anggaran. Selanjutnya data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepala SKPD, bendahara, dan kasubag program dan keuangan. karna merupakan pegawai yang terlibat langsung dalam penyerapan anggaran disetiap SKPD di Kabupaten Siak Sri Indrapura.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat disusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi sumber daya manusia di SKPD Kab. Siak Sri Indrapura dalam melakukan penyerapan anggaran.
2. Untuk mengetahui pengaruh komitmen organisasi terhadap SKPD dalam melakukan penyerapan anggaran.
3. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi SDM dan komitmen organisasi terhadap SKPD dalam melakukan penyerapan anggaran.

1.5 Manfaat penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberi tambahan ilmu pengetahuan bagi peneliti dalam menulis karya ilmiah terkhusus melakukan analisis dan menguji kompetensi sumber daya manusia, gaya kepemimpinan transformasional, komitmen organisasi terhadap tingkat penyerapan anggaran SKPD di Pemerintahan Kabupaten Siak Sri Indrapura.

2. Dapat dijadikan bahan masukan dan evaluasi kepada pemerintahan Kabupaten siak sri indrapura dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang transparansi dan akuntabel.
3. Menjadikan bahan pertimbangan dan referensi dalam meneliti dan dapat meningkatkan ilmu pengetahuan.

1.6 Sistematika penulisan

Penulisan ini terdiri dari lima bab yang disusun secara sistematis, yang mana antar bab saling berkaitan sehingga menjadi suatu rangkaian yang saling berkesinambungan. Untuk mengetahui isi dari penulisan penelitian ini, dengan demikian disusunlah sistematika penulisan skripsi, sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai latar belakang, rumusan masalah, asumsi dan batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai penelitian terdahulu, dan landasan teori. pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian yang akan digunakan sebagai acuan dalam melakukan pembahasan masalah.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini akan diuraikan penjelasan mengenai lokasi dan waktu penelitian, objek penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisis data, jenis penelitian, dan definisi konsep dan definisi operasional.

BAB 4 : DESKRIPSI HASIL PENELITIAN DAN ANALISA

Bab ini menjelaskan deskripsi data yang telah diperoleh dan analisis data dari penelitian yang telah dilakukan.

BAB 5 : PENUTUP

Bab ini merupakan bagian dari penelitian yang dilakukan yang menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN